

# **Pendidikan dan Pengangguran Intelektual**

*Tugas Matakuliah Analisis Kebijakan Publik*

*Dosen : Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin*



*Fauziah Mastuti.*

*Magister Administrasi Publik UNDIP*

*Konsentrasi Pelayanan Pendidikan Angkatan XXVI*

*2009*

Pendidikan merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk mencetak produk-produk pendidikan yang nantinya akan bersaing dalam pasar kerja. Oleh karena itulah, di dalam sistem pendidikan terdapat muatan kurikulum yang didesain sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Perubahan dan perbaikan kurikulum dalam pendidikan senantiasa dilakukan dengan alasan efektivitas. Perubahan kurikulum berlangsung dengan cepatnya, tak heran hal ini justru membuat banyak komponen pendidikan kebingungan. Tidak hanya para guru yang harus bekerja keras, murid pun mau tidak mau harus ikut menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Belum lama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diterapkan, kemudian diubah lagi dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perubahan kurikulum itu memang baik di satu sisi, apalagi dengan adanya KTSP ini memberikan otoritas kepada guru dan pihak sekolah untuk menyusun dan merumuskan sendiri kurikulum yang sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Hal ini tentu saja diharapkan mampu memacu semangat para guru untuk lebih kreatif dan profesional. Namun disisi lain perubahan kurikulum yang terkesan terburu-buru ini justru menjadi hambatan ketika dihadapkan pada ketidaksiapan guru dan kurangnya pengalaman guru untuk menyusun sebuah kurikulum sendiri. Terlepas dari hal tersebut, yang perlu dipikirkan kembali adalah bagaimana produk-produk pendidikan mampu memanfaatkan berbagai ilmu yang diperoleh dari bangku sekolah agar dapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Tuntutan dunia kerja saat ini semakin tinggi. Tidak hanya mampu dalam bidang akademis saja, tapi yang sedang dicari saat ini adalah orang-orang yang mempunyai *soft skill*. Para pencari kerja umumnya lebih menyukai orang-orang yang dalam dirinya mempunyai kemampuan yang lengkap, misalnya tidak hanya cerdas tapi juga ahli dibidang IT, penguasaan bahasa asing, dan sebagainya. Inilah yang menjadi permasalahan, tidak semua lulusan mempunyai kapasitas dan ketrampilan seperti yang dibutuhkan dunia kerja tersebut. Menurut Hough & Wiranta rendahnya kualitas sumber daya Indonesia dikarenakan (1994) “ *there are twin*

*problems of quality and relevance : graduates are widely such lacking skills that employers need and as having had no practical work experience "* (dikutip dalam blog Guswid)

Adanya ketidaksesuaian antara kualitas pendidikan dengan relevansinya dalam dunia kerja, menyebabkan banyaknya produk-produk pendidikan yang kesulitan untuk memasuki dunia kerja. Meskipun saat ini jumlah lulusan Perguruan Tinggi yang mempunyai *title* sarjana sangat banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu, nampaknya justru para lulusan sarjana itulah yang masih banyak menganggur. Dapat dibayangkan setiap tahunnya Perguruan Tinggi melakukan wisuda sampai 4 tahap, jika setiap tahap Perguruan Tinggi me-wisuda mahasiswa rata-rata 100 mahasiswa dari setiap fakultas, maka dapat dihitung berapa besar lulusan sarjana yang ada. Belum lagi jika diakumulasikan jumlah sarjana yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia jumlahnya tentu sangatlah besar. Dengan demikian jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk menampungnya tentu saja harus sebanding, jika tidak akan muncul fenomena pengangguran intelektual.

### **Fenomena Pengangguran Intelektual**

Umumnya para lulusan sarjana tersebut masih mempunyai idealisme yang cukup tinggi terhadap dunia kerja. Mereka memilih-milih pekerjaan yang sesuai dengan *background* pendidikannya, begitu pula soal pendapatan atau gaji yang akan diberikan oleh perusahaan, namun kadang mereka lupa tidak semua ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja mereka miliki. Kondisi semakin diperparah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada, dan jika ada pun kebanyakan yang diambil adalah lulusan SMK atau diploma yang dinilai sudah mempunyai ketrampilan yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan sarjana. Selain itu lulusan SMK atau diploma merupakan tenaga kerja yang umumnya mau dibayar lebih murah dan tidak menuntut hal-hal di luar kemampuan perusahaan.

Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka beberapa waktu yang lalu, nampaknya menjadi ajang perebutan bagi sejumlah lulusan sarjana di tanah air. Berbagai posisi yang ditawarkan hanya untuk beberapa orang ternyata diminati lebih dari porsi yang ditentukan. Hal semacam ini kadangkala menjadi lahan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Bukan menjadi rahasia umum, bahwa praktek KKN sangat

kental disini. Siapapun yang berani membayar mahal sudah dipastikan akan memperoleh posisi yang diinginkan. Ketika sudah menduduki posisi yang diinginkan, tak heran banyak pegawai yang bekerja hanya untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan dulu, sehingga praktek yang sama mungkin saja berulang. Mungkin bagi sebagian lulusan sarjana yang beruntung, dalam arti mempunyai kemampuan otak dilengkapi kemampuan financial, hal ini bukan menjadi kendala. Tapi permasalahannya bagi lulusan sarjana yang pandai tapi tidak mempunyai akses atau kemampuan finansial lebih. Apalagi bagi lulusan yang mempunyai kemampuan pas-pasan dan kemampuan financial yang pas-pasan pula. Kedua hal inilah yang mendorong terciptanya fenomena pengangguran intelektual. .

Apabila dilihat dari aspek kuantitas lulusan pendidikan tinggi, sebenarnya terdapat hal yang kontroversial. Di satu sisi kita kekurangan tenaga kerja yang berpendidikan sarjana, tetapi di sisi lain kita memiliki pengangguran sarjana dalam jumlah yang amat besar. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa lulusan Perguruan Tinggi kita memang banyak yang tidak diperlukan oleh pasar kerja.

### **Pendidikan dan Manusia Yang Kreatif**

Menanggapi fenomena pengangguran intelektual diatas, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah maupun berbagai komponen pendidikan. Karena pendidikan diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi para lulusannya. Pendidikan dengan berbagai muatan kurikulum didalamnya hendaknya dapat mendorong anak didik berpikir lebih kreatif dan inovatif. Salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan ketrampilan proses, dimana peserta didik diberikan kebebasan untuk mengadakan pengamatan, pengklasifikasian, penafsiran, peramalam, penerapan, perencanaan, penelitian, dan pengkomunikasian hasil pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. (Suyanto dan Djihad Hisyam : 2000 : 147). Anak didik sejak usia dini harus dipahami sebagai manusia yang memiliki berbagai keunikan, minat dan bakat yang harus dikembangkan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan dari guru kepada anak didik. Guru sebagai fasilitator diharapkan dapat menumbuhkan serta mamacu kemauan anak didik untuk lebih aktif dan kreatif menemukan berbagai hal baru.